

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi akuntansi publik menyediakan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pasal 6 dalam undang-undang no.1 tahun 2004 menjelaskan tentang adanya wewenang dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal pengelolaan keuangan di daerah yang juga berhubungan dengan APBD yang digunakan untuk BUMD. Peneliti termotivasi untuk mengangkat judul ini karena adanya fenomena ketidakjujuran dalam melaporkan laporan keuangan BUMD yang membuat Inspektorat Daerah untuk melakukan audit Badan Usaha Milik Daerah PT Selo Adikarto (SAK) karena dinilai tidak transparan dalam membuat laporan keuangan atau administrasi, sikap tertutup yang dilakukan BUMD ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres di internal mereka.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setiyaningrum (2017) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah yang disetorkan oleh BUMD mengalami penurunan dan kinerja yang dimiliki BUMD kurang bagus. Agar tercipta BUMD yang memiliki kinerja bagus seluruh staff harus mematuhi peraturan, selain itu harus memiliki akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu ciri-ciri bagaimana mengelola anggaran dan juga suatu hal yang penting dalam pemerintahan yang baik.

Dari uraian tersebut sesuai dengan Q.S An-Nissa ayat 58, yaitu :

بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

” Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Surah diatas berarti bahwa harus menyampaikan amanat – amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dalam artian sebai lembaga sektor publik yang baik harus melakukan transparansi kepada pihak yang berhak menerima atau mendapatkan informasi, seperti masyarakat luas maupun anggota DPRD. Hal tersebut untuk meningkatkan transparansi lembaga sektor publik terhadap masyarakat luas, selain itu juga untuk mengontrol dan mengawasi kinerja lembaga sektor publik.

Keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga terdapat anggaran perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah peraturan ini menyatakan bahwa beberapa daerah tentunya memiliki kekayaan daerah yang dipisahkan, kekayaan tersebut pada umumnya dipisahkan dari perusahaan daerah yang merupakan bagian dari kekayaan daerah tersebut ada dasarnya pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah dan juga dapat menjadi pertumbuhan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi fakta yang didapatkan di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian dari BUMD yang berada di Indonesia masih memiliki kinerja kurang bagus.

Pada tahun 2019 Bupati Kulon Progo menerima penghargaan sebagai Pembina BUMD terbaik dalam ajang TOP BUMD 2019 di Jakarta,9 Kamis (2/5/2019) (Tribun Jogja, 2019).

Penghargaan itu diraih atas kesuksesan Bupati Kulon Progo dalam memberi kontribusi untuk memajukan usaha milik daerah hingga bisa berprestasi (Progo, 2020). BUMD yang meraih penghargaan sebagai BUMD berprestasi dan berkinerja terbaik adalah PT Selo Adikarto (SAK) yang dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain PT Selo Adikarto (SAK) Kulon Progo juga mempunyai beberapa BUMD lain yaitu, PD BPR Bank Pasar, Perumda Aneka Usaha, dan PDAM Tirta Binangun. Dari tahun ke tahun beberapa BUMD tersebut selalu mengalami peningkatan dan juga terdapat permasalahan tetapi permasalahan tersebut bisa dilalui, peningkatan yang terjadi setiap tahun ke tahun tersebut juga menyetorkan sebagai PAD yang dapat membantu peningkatan keuangan daerah Kulon Progo sendiri.

Perkembangan BUMD di Kulon Progo sudah bagus, namun masih butuh perhatian dan dukungan dari pemkab, terdapat beberapa permasalahan atau kasus yang menunjukkan fakta tersebut yaitu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Inspektorat Daerah untuk melakukan audit Badan Usaha Milik Daerah PT Selo Adikarto (SAK) karena dinilai tidak transparan dalam membuat laporan keuangan atau administrasi, sikap tertutup yang dilakukan BUMD ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres di internal mereka (Yogya, 2017). Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Pemkab Kulon Progo mengoptimalkan peran dewan pengawas, agar dewan pengawas membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) dan laporan yang akurat seperti laporan akuntan publik sehingga kalau terjadi kerugian cepat untuk diketahui dan diatasi. Bukan hanya BUMD pada daerah Kulon Progo saja yang memiliki kasus, tetapi juga BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempunyai kasus berupa minimnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Salah satunya terdapat pada Perusahaan Daerah (PD) Taru Martani, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), PT Anindya Mitra Internasional (AMI), dan Badan Pembangunan Daerah

(BPD) yang diharapkan bisa menyetor PAD yang lebih banyak. Tetapi diantara Perusahaan tersebut yang mengalami krisis financial dengan kondisi paling parah terjadi pada PT AMI (Setyaningrum, 2016)

Adanya kasus-kasus tersebut yang tentunya sudah menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen BUMD belum dikelola dengan baik karena belum berjalannya fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum dipahaminya prinsip transparansi dan akuntabilitas. BUMD merupakan badan usaha milik daerah yang tujuan pembentukannya salah satunya adalah melayani kepentingan masyarakat atau publik hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari para pegawai atau SDM dari BUMD tersebut kurang baik, terlebih pada prinsip akuntabilitas yang belum terlaksana dengan baik, kemudian selain prinsip akuntabilitas terdapat juga prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam mereka mengelola anggaran kurang baik, adapun juga karena pengawasan dan ketepatan waktu guna mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan kurang baik.

Hal tersebut juga berhubungan dengan teori *Stewardship* yang artinya adalah tentang kondisi pada manajer yang mempunyai dorongan untuk mencapai target utamanya dengan mementingkan kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini berhubungan karena manajer atau pimpinan BUMD mempunyai dorongan untuk lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran BUMD di Yogyakarta penelitian ini dilakukan pada beberapa BUMD yang terdapat di Yogyakarta yaitu BUMD Aneka Usaha Kulon Progo, PDAM Kulon Progo, BUMD PT Selo Adikarto, PDAM Sleman, PDAM Sleman, PDAM Kota Yogyakarta, dan PDAM Bantul.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Setiyanningrum (2017) yang sudah melakukan penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Hasil penelitian Setiyanningrum (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel Ketepatan Waktu dan terhadap kinerja anggaran tidak dengan konsep Value For Money. Selain itu pada penelitian ini subyek penelitian fokus pada Kepala BUMD dan semua karyawan, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian pada karyawan bidang akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Persamaan pada penelitian ini juga dilakukan pada BUMD di Yogyakarta. Kontribusi dalam penelitian ini untuk meningkatkan tingkat kinerja para pegawai BUMD di Yogyakarta dengan melihat tingkat akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran, sehingga perbedaan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel ketepatan waktu sebagai variabel independen. Dengan begitu para pegawai BUMD dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaporkan dan dapat mencegah adanya kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD?

3. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD?
4. Apakah ketetapan waktu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada BUMD
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada BUMD
3. Untuk menguji pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada BUMD
4. Untuk menguji pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran pada BUMD

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, baik secara teoritis maupun praktis bagi beberapa pihak, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi bahan literatur bagi peneliti selanjutnya.
- b. Dapat menambah ilmu , wawasan dan informasi mengenai tata kelola pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan sebagai evaluasi pemerintah terhadap sistem yang dimilikinya agar tercipta sistem pemerintahan yang baik.

b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang belum baik sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah.

c. Bagi akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur atau rujukan serta dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa dengan topik yang sama.